NBGR
NUSANTARA BORDER GOVERNANCE REVIEW

e-ISSN: XXXX-XXXX
p-ISSN: XXXX-XXXX
Volume 1, Nomor 1
Juni 2026

ARTIKEL RISET ASLI

AKSES TERBUKA

Mengubah Perbatasan Indonesia–Papua Nugini dari Wilayah Pinggiran Menjadi Gerbang Melalui Tata Kelola, Ketahanan Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan

Transforming the Indonesia–Papua New Guinea Border From Periphery to Gateway Through Governance, Economic Resilience, and Sustainable Development

Tiomy Butsianto Adi [1], **Shalahuddin** [2*]

[1] Program Studi Magister Manajemen, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Wamena, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia

*Surel Korespondensi: shalahuddinayubi@gmail.com

ABSTRAK

Perbatasan Indonesia–Papua Nugini sedang mengalami transformasi fungsional, dari wilayah perbatasan yang utamanya berorientasi pada aspek keamanan menjadi ruang yang semakin aktif untuk perdagangan, mobilitas, interaksi sosial, dan kerja sama subnasional. Studi ini mengkaji apakah koridor perbatasan Skouw–Wutung telah mengembangkan landasan kelembagaan dan ekonomi yang diperlukan untuk berevolusi dari pos perbatasan periferal menjadi gerbang ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain analisis campuran berbasis data sekunder, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif deskriptif, analisis dokumen, triangulasi bukti, serta analisis kebijakan komparatif. Data dikumpulkan dari statistik resmi, lembaga pengelola perbatasan, data kepabeanan, dokumen pemerintah, dan studi ilmiah yang ditelaah sejawat (*peer-reviewed*), yang sebagian besar diterbitkan antara tahun 2021 dan September 2026. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi nilai ekspor tahunan, struktur komoditas, mobilitas lintas batas, pertukaran mata uang, pengaturan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Nilai ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw meningkat dari sekitar Rp50,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp92,93 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan kenaikan sebesar kurang lebih 83,88%. Nilai ekspor pada bulan Januari meningkat dari Rp3,50 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp6,57 miliar pada tahun 2026, atau sekitar 87,63%. Produk rumah tangga, makanan, dan minuman menjadi komponen terbesar dalam ekspor tahun 2025. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa perluasan perdagangan tidak secara otomatis menghasilkan pembangunan lokal yang inklusif, karena tata kelola perbatasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti asimetri kelembagaan, minimnya bukti mengenai retensi nilai ekonomi di tingkat lokal, partisipasi pelaku ekonomi masyarakat adat yang belum merata, risiko keamanan hayati (biosekuriti), perlintasan informal, serta kendala transportasi. Berdasarkan bukti yang telah

DOI: 10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

Diterima: 22 April 2026
Direvisi: 29 Mei 2026
Disetujui: 3 Juni 2026
Diterbitkan: 17 Juni 2026
Diterbitkan Daring: 17 Juni 2026

Hak Cipta © 2026 Penulis.

Diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

divalidasi melalui triangulasi, studi ini mengusulkan Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Border Economic Resilience Framework* (IBERF). Kerangka kerja ini menghubungkan kualitas tata kelola perbatasan, kapasitas produktif lokal, konektivitas lintas batas, inklusi ekonomi masyarakat adat, dan keamanan perbatasan yang cerdas (*smart border security*), guna menjelaskan bagaimana peningkatan arus di perbatasan dapat diubah menjadi nilai ekonomi yang dirasakan dan dipertahankan di tingkat lokal. Studi ini menyimpulkan bahwa Skouw sebaiknya tidak hanya dikelola sebagai fasilitas perlintasan, melainkan sebagai koridor ekonomi terintegrasi yang menghubungkan Jayapura, Skouw, Wutung, dan Vanimo.

Kata Kunci: Tata Kelola Perbatasan; PLBN Skouw; Papua Nugini; Ekonomi Perbatasan; Ketahanan Ekonomi Lokal; Ekonomi Masyarakat Adat; Konektivitas Lintas Batas.

ABSTRACT

The Indonesia-Papua New Guinea border is undergoing a functional transformation from a predominantly security-oriented territorial frontier into an increasingly active space of trade, mobility, social interaction, and subnational cooperation. This study examines whether the Skouw-Wutung border corridor has developed the institutional and economic foundations required to evolve from a peripheral border post into a sustainable economic gateway. A secondary-data mixed analytical design was employed by integrating descriptive quantitative analysis, document analysis, evidence triangulation, and comparative policy analysis. Evidence was collected from official statistics, border-management institutions, customs-related data, government documents, and peer-reviewed studies published mainly between 2021 and September 2026. Annual export values, commodity structures, cross-border mobility, currency exchange, institutional arrangements, and community participation were analyzed. Export value through PLBN Skouw increased from approximately IDR 50.54 billion in 2024 to IDR 92.93 billion in 2025, representing an increase of approximately 83.88%. January export value increased from IDR 3.50 billion in 2025 to IDR 6.57 billion in 2026, or approximately 87.63%. Household products, food, and beverages constituted the largest reported component of 2025 exports. The findings nevertheless show that expanding trade does not automatically produce inclusive local development because border governance continues to face institutional asymmetry, limited evidence on local value retention, uneven participation of indigenous economic actors, biosecurity risks, informal crossings, and transportation constraints. Based on the triangulated evidence, the study proposes the Integrated Border Economic Resilience Framework (IBERF), which connects border governance quality, local productive capacity, cross-border connectivity, indigenous economic inclusion, and smart border security to explain how increasing border flows can be translated into locally retained economic value. The study concludes that Skouw should be managed not merely as a crossing facility but as an integrated economic corridor linking Jayapura, Skouw, Wutung, and Vanimo.

Keywords: *Border Governance; PLBN Skouw; Papua New Guinea; Border Economy; Local Economic Resilience; Indigenous Economy; Cross-Border Connectivity.*

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

1. Pendahuluan

Batas negara menjalankan berbagai fungsi yang terkadang saling bertentangan. Batas negara merupakan instrumen kedaulatan dan kendali teritorial, namun di saat yang sama dapat berfungsi sebagai jalur perdagangan, mobilitas, pertukaran budaya, dan integrasi ekonomi regional. Oleh karena itu, studi perbatasan kontemporer semakin mengonseptualisasikan batas negara bukan sekadar sebagai garis wilayah yang tetap, melainkan sebagai institusi dan ruang sosial yang fungsinya terus dinegosiasikan oleh pemerintah, pasar, dan masyarakat setempat (Korwa, 2026a; Usman, 2017).

Perspektif ini sangat relevan dengan batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG). Batas tersebut memisahkan dua negara, namun di saat yang sama bersinggungan dengan jejaring sosial Melanesia, wilayah adat, sistem kekerabatan, pasar, kegiatan keagamaan, dan mobilitas sehari-hari. Penelitian terkini menggambarkan kondisi ini sebagai tata kelola perbatasan yang asimetris, terutama karena terdapat perbedaan intensitas investasi infrastruktur, kehadiran administratif, dan kapasitas pengelolaan perbatasan di kedua sisi (Korwa, 2026a).

Skouw–Wutung merupakan perlintasan batas darat di wilayah utara yang paling berkembang, yang menghubungkan Jayapura di Indonesia dengan Vanimo di PNG. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw menjalankan fungsi imigrasi, bea cukai, karantina, keamanan, ekonomi, dan pelayanan publik. Belakangan ini, fungsi ekonominya telah berkembang secara signifikan.

Data bea cukai yang dilaporkan pada Januari 2026 menunjukkan bahwa ekspor ke PNG melalui PLBN Skouw meningkat dari sekitar Rp50,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp92,93 miliar pada tahun 2025. Angka ini mencerminkan pertumbuhan nominal tahun-ke-tahun (*year-on-year*) sebesar kurang lebih 83,88% (Evarukdijati, 2026). Tren peningkatan ini berlanjut hingga awal tahun 2026. Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat transaksi ekspor sebesar Rp3,4999 miliar pada Januari 2025 dan Rp6,5670 miliar pada Januari 2026, yang setara dengan peningkatan sekitar 87,63% (Siregar, 2026).

Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya pergerakan orang. PLBN Skouw mencatat sekitar 50.000 pergerakan lintas batas selama tahun 2025, dengan warga negara PNG mencakup proporsi yang cukup besar dari jumlah pengunjung; banyak di antaranya memasuki Indonesia untuk membeli barang konsumsi di pasar perbatasan Skouw. Interaksi ekonomi juga terlihat dari arus mata uang. Selama semester pertama tahun 2025, nilai penukaran kina PNG ke rupiah Indonesia di Pasar Skouw mencapai sekitar Rp9,6 miliar, sementara nilai penukaran rupiah ke kina mencapai sekitar Rp5,7 miliar (Evarukdijati, 2025).

Namun, pertumbuhan dalam perdagangan dan mobilitas memunculkan pertanyaan analitis yang lebih penting: apakah peningkatan aktivitas lintas batas benar-benar menghasilkan nilai ekonomi yang inklusif dan dapat dipertahankan secara lokal bagi masyarakat di wilayah perbatasan?

Literatur terkini telah mengkaji beberapa dimensi secara terpisah. Frank dkk. (2026) mempelajari perubahan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh pengembangan PLBN Skouw. Pakasi dkk. (2024) menekankan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur pertanian. Korwa (2026a) meneliti tata kelola asimetris dan praktik keseharian di perbatasan, sementara Korwa (2026b) membahas kerja sama Jayapura–Vanimo dari perspektif de-sekuritisasi. Kalalo dkk. (2025) berfokus pada hak adat masyarakat pribumi, dan Maryen dkk. (2021) mengkaji partisipasi perempuan asli Papua di Pasar Skouw.

Studi-studi tersebut secara substansial meningkatkan pemahaman mengenai perbatasan Indonesia–PNG, namun masih terdapat kesenjangan penting. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan berbagai aspek—seperti percepatan perdagangan pascapandemi, struktur komoditas, mobilitas lintas batas, arus keuangan, asimetri kelembagaan, partisipasi ekonomi masyarakat adat, konektivitas transportasi, dan risiko keamanan—ke dalam satu kerangka kerja ketahanan ekonomi yang utuh. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana arus ekonomi yang tercipta di perbatasan dapat diubah menjadi nilai ekonomi yang dapat dipertahankan secara lokal. Studi ini menjawab tiga pertanyaan penelitian:

a. Bagaimana aktivitas ekonomi formal melalui PLBN Skouw mengalami perubahan selama periode terkini?
b. Faktor kelembagaan dan struktural apa yang menentukan apakah peningkatan arus lintas batas dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal?
c. Kerangka tata kelola seperti apa yang dapat mengubah perlintasan Skouw–Wutung dari sekadar fasilitas pengendalian perbatasan menjadi gerbang ekonomi perbatasan yang berkelanjutan?

1.1. Tata Kelola Perbatasan

Tata kelola perbatasan mencakup institusi, regulasi, infrastruktur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola pergerakan melintasi batas negara. Cakupan kontemporernya meluas melampaui imigrasi dan perlindungan wilayah, hingga mencakup bea cukai, karantina, transportasi, pasar, diplomasi subnasional, layanan publik, dan hubungan kemasyarakatan.

Penelitian terkini oleh Korwa mengenai perbatasan Indonesia–PNG menunjukkan bahwa asimetri tata kelola muncul akibat perbedaan dalam kapasitas negara, investasi infrastruktur, dan kehadiran administratif. Meskipun demikian, masyarakat merespons secara aktif melalui mobilitas, kekerabatan, perdagangan lokal, dan jejaring keagamaan (Korwa, 2026a). Dengan demikian, tata kelola tidak dapat dipahami semata-mata melalui institusi negara formal, karena praktik sehari-hari merupakan bagian penting dari bagaimana perbatasan berfungsi dalam kenyataan.

1.2. Infrastruktur Perbatasan dan Transformasi Sosial-Ekonomi

Frank dkk. (2026) menemukan bahwa pengembangan PLBN Skouw telah berkontribusi pada perdagangan lintas batas, pariwisata perbatasan, dan kegiatan budaya. Studi mereka mendokumentasikan pemulihan perdagangan perbatasan yang signifikan pascapandemi dan mengidentifikasi Skouw sebagai pusat sosial-ekonomi yang sedang berkembang.

Analisis mereka sangat relevan, namun berfokus terutama pada transformasi sosial-ekonomi setelah pembangunan infrastruktur. Studi ini memperluas cakupan tersebut dengan mempertanyakan apakah peningkatan arus perdagangan juga menghasilkan retensi nilai lokal, alih-alih sekadar mengasumsikan bahwa peningkatan transaksi secara otomatis berarti ketahanan ekonomi lokal.

1.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Adat

Pakasi dkk. (2024) menemukan bahwa tata kelola perbatasan yang sukses memerlukan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, pendidikan, pelatihan, dan

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

partisipasi masyarakat. Temuan mereka mendukung pandangan bahwa dalam pembangunan perbatasan, kapasitas masyarakat sama pentingnya dengan infrastruktur fisik.

Maryen dkk. (2021) mendokumentasikan partisipasi yang relatif terbatas dari perempuan asli Papua dalam ekonomi pasar perbatasan Skouw, serta menekankan kendala terkait modal, diversifikasi produk, dan akses pasar. Selanjutnya, Kalalo dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembangunan perbatasan juga harus mempertimbangkan hak atas tanah adat dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Temuan-temuan ini penting karena peningkatan perdagangan secara agregat dapat menutupi ketimpangan partisipasi di antara para pelaku lokal.

1.4. Kerja Sama dan Konektivitas Lintas Batas

Pugu dan Renyaan (2025) menganalisis kerja sama Jayapura–Vanimo–Wewak melalui perspektif paradiplomasi dan kota kembar (*sister-city*), serta menyoroti relevansinya bagi konektivitas ekonomi dan budaya. Dalam studi yang lebih baru, Korwa (2026b) menunjukkan bahwa hubungan Jayapura–Vanimo berkontribusi pada normalisasi kerja sama, namun masih menghadapi asimetri struktural dan kondisi pembangunan yang tidak merata.

Pemerintah Provinsi Papua melaporkan pada November 2025 bahwa Indonesia dan PNG sedang berupaya merampungkan nota kesepahaman, prosedur operasional standar, dan pengaturan asuransi untuk jalur transportasi lintas batas Jayapura–Vanimo (Pemerintah Provinsi Papua, 2025). Agenda transportasi yang tengah berkembang ini penting karena akses pasar tidak hanya bergantung pada fasilitas perbatasan, tetapi juga pada mobilitas yang dapat diprediksi di sepanjang koridor tersebut.

Perkembangan studi mengenai wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Papua, terus mengalami dinamika, dengan fokus kajian yang beragam mulai dari aspek sosial-ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan, hingga kerja sama lintas batas. Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan realitas kawasan perbatasan, namun sekaligus meninggalkan kesenjangan akademis (*research gap*) yang menjadi landasan bagi penelitian ini.

Pada tataran ekonomi lokal dan gender, Maryen dkk. (2021) mengungkapkan adanya ketimpangan partisipasi ekonomi pedagang perempuan asli Papua di Pasar Skouw melalui pendekatan kualitatif. Meskipun berhasil memotret dinamika mikro, studi tersebut belum mengintegrasikan aspek pertumbuhan perdagangan makro dan tata kelola perbatasan. Di sisi kebijakan dan infrastruktur, studi kualitatif oleh Aedah dan Muchsin (2021) di Keerom berhasil mengidentifikasi berbagai hambatan administratif dan infrastruktur dasar, namun memberikan perhatian yang masih terbatas pada proses transformasi ekonomi kawasan perbatasan secara menyeluruh.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Pakasi dkk. (2024) menghubungkan sektor pertanian, peningkatan kapasitas, dan tata kelola lokal. Kendati demikian, studi tersebut belum menganalisis akselerasi tren ekspor terbaru di wilayah tersebut. Sementara itu, Siborutorop (2024) menyoroti aspek ketimpangan lintas batas dengan menjelaskan asimetri kapasitas negara serta investasi regional, namun belum menyentuh analisis mendalam terkait retensi nilai tambah lokal (*local value retention*).

Perspektif hukum dan institusional juga terus berkembang. Kalalo dkk. (2025) memperkuat pemahaman mengenai hak-hak adat masyarakat lokal menggunakan pendekatan normatif-empiris, tetapi tidak mengaitkannya dengan struktur perdagangan perbatasan. Dari sudut pandang

diplomasi kawasan, Pugu dan Renyaan (2025) mengkaji skema *sister-city* dan paradiplomasi untuk menyoroti kerja sama lintas batas, walaupun studi mereka masih terbatas pada analisis kebijakan kualitatif tanpa dukungan bukti ekonomi kuantitatif yang kuat.

Dua kontribusi penting lainnya dirilis oleh Frank dkk. (2026) dan Korwa (2026a, 2026b). Penelitian etnografi oleh Frank dkk. (2026) mencatat transformasi sosial-ekonomi akibat pembangunan PLBN, namun belum mengukur secara eksplisit tingkat penyerapan nilai lokal (*local value capture*). Di sisi lain, Korwa (2026a, 2026b) menerbitkan dua studi kualitatif mendalam: pertama, mengenai tata kelola perbatasan yang asimetris dan bagaimana masyarakat menegosiasikannya—meski tidak menempatkan ketahanan ekonomi sebagai luaran analitis utama; dan kedua, kajian kota kembar Jayapura–Vanimo yang menghubungkan kerja sama perbatasan dengan proses de-sekuritisasi, walaupun belum mengintegrasikan data perdagangan komoditas dan fluktuasi mata uang secara terpadu.

Kebaruan dari studi ini bukanlah klaim bahwa PLBN Skouw menstimulasi aktivitas ekonomi, karena hubungan tersebut telah diidentifikasi sebelumnya (Frank dkk., 2026). Kontribusi studi ini terletak pada pembedaan antara perluasan arus ekonomi lintas batas dengan kapasitas masyarakat perbatasan serta sektor produktif milik lokal dalam mempertahankan nilai dari arus tersebut. Dengan demikian, studi ini mengidentifikasi retensi nilai lokal sebagai dimensi ketahanan ekonomi perbatasan yang selama ini kurang terukur, alih-alih sekadar sebagai hasil yang diestimasi secara langsung dari data administratif yang tersedia.

Proposisi analitisnya adalah bahwa tata kelola perbatasan yang efektif dapat memperkuat konektivitas dan arus lintas batas yang sah. Peningkatan arus tersebut menciptakan peluang ekonomi, namun ketahanan lokal yang berkelanjutan bergantung pada kapasitas produktif lokal, partisipasi penduduk setempat, akses pasar, serta fasilitasi kelembagaan yang terjamin. Karena studi ini tidak mengestimasi retensi nilai lokal secara langsung, maka diusulkan Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Border Economic Resilience Framework*/ IBERF), yaitu kerangka konseptual yang diturunkan melalui triangulasi bukti-bukti sekunder. Kerangka kerja ini mengintegrasikan kondisi kelembagaan dan ekonomi yang memungkinkan porsi lebih besar dari nilai yang dihasilkan di wilayah perbatasan untuk tetap berada dalam ekonomi lokal.

2. Metode

2.1. Desain Penelitian

Studi ini menerapkan desain analisis campuran berbasis data sekunder. Meskipun tidak dilakukan survei rumah tangga primer, analisis ini melampaui tinjauan pustaka konvensional dengan menggabungkan indikator administratif kuantitatif dan bukti dokumenter kualitatif secara sistematis. Periode pengamatan utama mencakup tahun 2024 hingga September 2026, sementara studi-studi terdahulu yang telah melalui telaah sejawat (*peer-reviewed*) digunakan untuk membangun konteks teoretis dan longitudinal.

Empat komponen analisis digabungkan: analisis kuantitatif deskriptif, analisis komparatif temporal, analisis dokumen terstruktur, dan triangulasi bukti lintas sumber. Analisis kuantitatif berfokus pada nilai ekspor yang dilaporkan, tingkat pertumbuhan, komposisi komoditas, pergerakan lintas batas, dan indikator nilai tukar mata uang. Analisis dokumen menelaah bukti terkait tata kelola, partisipasi masyarakat, konektivitas, dan risiko di wilayah perbatasan. Temuan-

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

temuan tersebut kemudian dibandingkan di antara sumber-sumber kelembagaan resmi, studi telaah sejawat, dan laporan sekunder yang kredibel untuk mengidentifikasi bukti yang selaras maupun yang berbeda.

2.2. Unit Analisis dan Koridor Studi

Unit analisis utama adalah sistem ekonomi perbatasan Skouw–Wutung, khususnya koridor yang menghubungkan Jayapura, Muara Tami, PLBN Skouw, Wutung, dan Vanimo. Dengan demikian, PLBN Skouw dianalisis sebagai simpul kelembagaan dalam koridor lintas batas yang lebih luas, bukan sekadar sebagai bangunan yang berdiri sendiri.

2.3. Pemilihan Sumber dan Hierarki Kredibilitas

Bukti dipilih menggunakan hierarki kredibilitas tiga tingkat. Tingkat 1 terdiri atas sumber kelembagaan resmi, seperti BNPP RI, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, serta data administratif terkait kepabeanan (BPS Provinsi Papua, 2026). Tingkat 2 terdiri atas literatur akademik yang telah melalui telaah sejawat, dengan halaman penerbit yang dapat dilacak dan memiliki pengidentifikasi DOI (jika tersedia). Tingkat 3 terdiri atas laporan berita kredibel yang secara langsung menyebutkan lembaga pemerintah dan kumpulan data administratif yang dilaporkan. Sumber tetap digunakan apabila kepenulisan, asal kelembagaan, klaim numerik, dan informasi bibliografinya dapat dilacak.

Sumber dengan kepenulisan yang tidak jelas, klaim numerik yang tidak dapat diverifikasi, asal data yang tidak dapat dilacak, atau informasi bibliografi yang tidak memadai, tidak disertakan dalam basis bukti utama. Analisis ini mengikuti tahapan: identifikasi sumber, ekstraksi data, perbandingan indikator, pengodean tematis, dan triangulasi lintas sumber. Prosedur ini mengurangi risiko menganggap laporan media yang berulang sebagai bukti yang independen.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Analisis

Dimensi	Indikator Utama	Bukti Primer
Arus ekonomi	Nilai ekspor, tingkat pertumbuhan, struktur komoditas	Bea Cukai/BNPP RI/BPS
Mobilitas manusia	Pergerakan lintas batas, kunjungan pasar	PLBN/BNPP RI/laporan pemerintah
Interaksi keuangan	Penukaran kina–rupiah	Data Bank Indonesia yang dilaporkan oleh ANTARA
Konektivitas kelembagaan	Pengaturan transportasi, layanan PLBN, koordinasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ)	Pemerintah Provinsi Papua/BNPP RI
Ketahanan inklusif	Partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), partisipasi masyarakat adat, kapasitas produksi lokal	Literatur yang ditelaah sejawat (*peer-reviewed*) dan dokumen kebijakan

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

2.4. Analisis Kuantitatif

Pertumbuhan ekspor tahunan dihitung dengan rumus: Tingkat Pertumbuhan = [(Nilai pada t – Nilai pada t–1) / Nilai pada t–1] × 100. Berdasarkan nilai tahunan yang dilaporkan, peningkatan dari Rp50,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp92,931 miliar pada tahun 2025 setara dengan sekitar 83,88%. Peningkatan dari Rp3,4999 miliar pada Januari 2025 menjadi Rp6,5670 miliar pada Januari 2026 setara dengan sekitar 87,63%. Persentase hasil perhitungan ini dibedakan secara tegas dari angka-angka yang dilaporkan langsung oleh lembaga terkait.

2.5. Analisis Kualitatif dan Triangulasi

Dokumen-dokumen dikodekan ke dalam lima tema berulang: fasilitasi perdagangan, konektivitas, partisipasi ekonomi lokal, asimetri tata kelola, serta risiko perbatasan dan kendali kelembagaan. Bukti-bukti kemudian dibandingkan lintas kategori sumber, baik dari lembaga maupun akademis. Sebuah kesimpulan dianggap cukup kuat apabila didukung oleh lebih dari satu kategori sumber independen dan tidak bergantung pada satu laporan media saja.

2.6. Keterbatasan Metodologis

Pertama, nilai ekspor tidak mengukur kesejahteraan rumah tangga secara langsung. Kedua, data administratif yang tersedia tidak secara konsisten membedakan antara barang yang diproduksi di Papua dengan barang yang dikirim melalui Papua namun diproduksi di tempat lain. Ketiga, transaksi lintas batas informal masih sulit untuk dikuantifikasi. Keempat, data perdagangan bulanan tidak boleh disetahunkan (*annualized*) secara mekanis karena arus komoditas bisa bersifat musiman.

Keterbatasan ini sangat penting karena mencegah studi ini menyamakan pertumbuhan perdagangan dengan peningkatan kesejahteraan lokal. Sebaliknya, pertumbuhan perdagangan dianggap sebagai bukti meningkatnya aktivitas ekonomi, yang harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan partisipasi lokal serta kapasitas produktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peningkatan Signifikan dalam Ekspor Formal

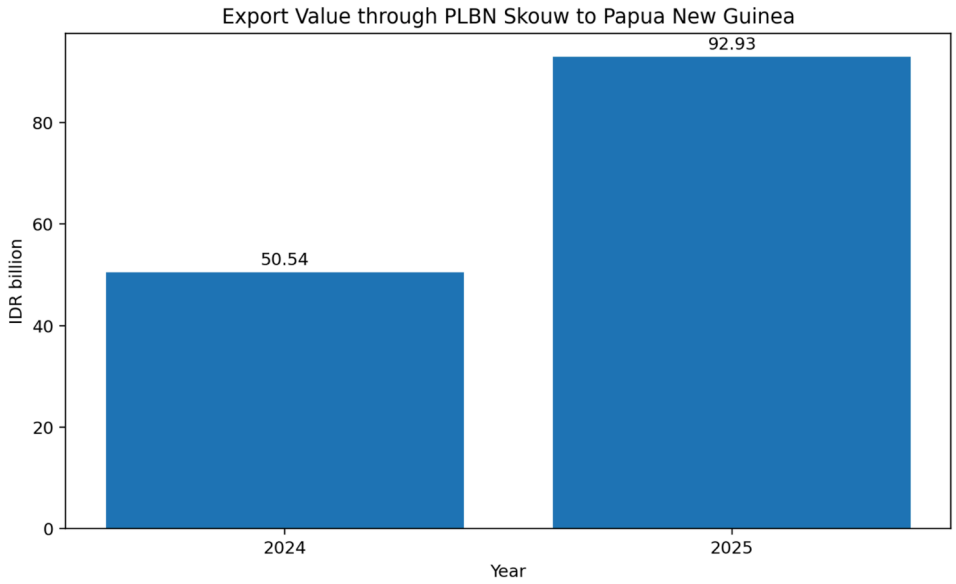
Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas ekspor formal mengalami perluasan yang substansial. Peningkatan tahunan sebesar kurang lebih 83,88% tergolong sangat signifikan, terutama karena terjadi setelah fase pemulihan pascapandemi. Penelitian yang telah melalui telaah sejawat (*peer-reviewed*) baru-baru ini secara independen mengidentifikasi periode 2022–2025 sebagai masa pemulihan dan ekspansi yang pesat dalam perdagangan di Skouw–Wutung (Frank dkk., 2026).

Tabel 2. Indikator Ekspor di PLBN Skouw

Indikator	Periode Sebelumnya	Periode Berikutnya	Perubahan yang Dihitung
Nilai ekspor tahunan	Rp50,54 miliar (2024)	Rp92,931 miliar (2025)	+83,88%
Nilai ekspor bulan Januari	Rp3,500 miliar (Jan 2025)	Rp6,567 miliar (Jan 2026)	+87,63%

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

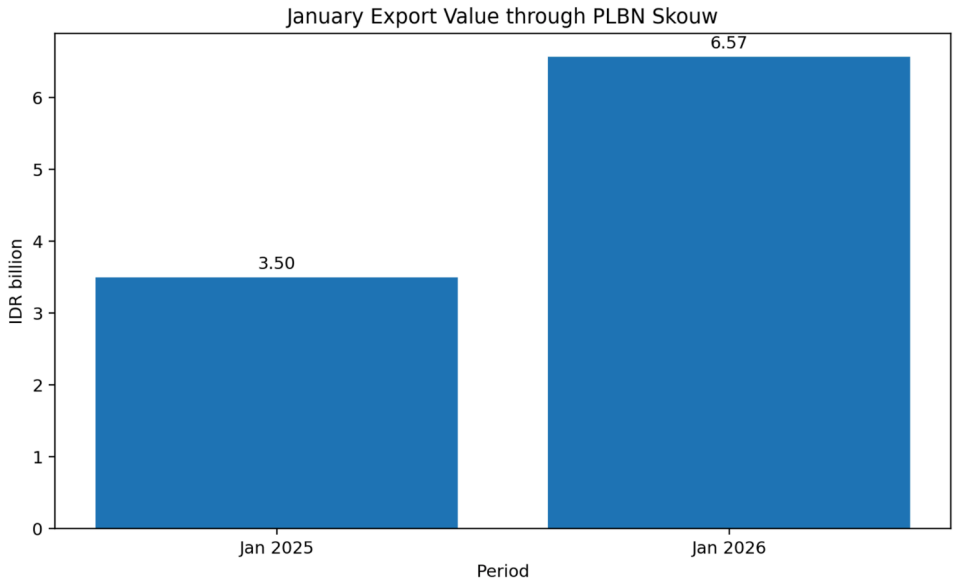


Gambar 1. Nilai Ekspor melalui PLBN Skouw, 2024–2025

Sumber: Disusun dari data bea cukai yang dilaporkan oleh Evarukdijati (2026).

3.2. Data Awal 2026 Menunjukkan Momentum yang Berlanjut

Nilai ekspor meningkat dari Rp3,4999 miliar pada Januari 2025 menjadi Rp6,5670 miliar pada Januari 2026. Hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa ekspor tahunan akan serta-merta meningkat dengan persentase yang sama, mengingat perdagangan bulanan dapat berfluktuasi. Meskipun demikian, perbandingan bulan Januari menunjukkan bahwa kinerja perdagangan yang lebih kuat pada tahun 2025 tidak langsung berbalik arah pada awal tahun 2026 (Siregar, 2026).



Gambar 2. Perbandingan Nilai Ekspor Bulan Januari melalui PLBN Skouw, Tahun 2025 dan 2026

Sumber: Disusun dari data BNPP RI (Siregar, 2026)

3.3. Struktur Komoditas

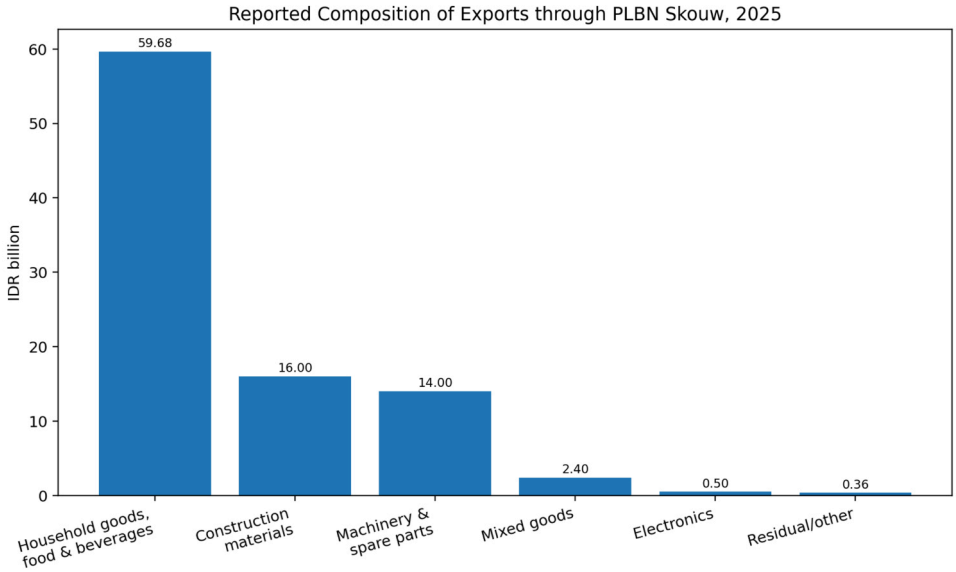
Tabel 3. Komposisi Ekspor Skouw yang Dilaporkan pada Tahun 2025

Kelompok Komoditas	Nilai Perkiraan	Porsi terhadap Total Ekspor
Produk rumah tangga, makanan, dan minuman	RP59,676 MILIAR	64,21%
Bahan konstruksi	RP16,000 MILIAR	17,22%
Mesin dan suku cadang	RP14,000 MILIAR	15,06%
Barang campuran	RP2,400 MILIAR	2,58%
Elektronik	RP0,499 MILIAR	0,54%
Selisih/lain-lain	RP0,357 MILIAR	0,38%
Total	**Rp92,931 miliar**	**100%**

Sumber: Data diolah peneliti, 2026.

Distribusi komoditas ini menunjukkan karakteristik struktural yang signifikan. Sekitar 64% dari nilai ekspor yang dilaporkan terdiri atas produk rumah tangga, makanan, dan minuman, sementara bahan konstruksi serta mesin/suku cadang mencakup sebagian besar sisanya (Evarukdijati, 2026).

Akan tetapi, data yang tersedia tidak menunjukkan berapa proporsi barang-barang tersebut yang benar-benar diproduksi di Papua. Dengan demikian, ekonomi perbatasan dapat menunjukkan perputaran perdagangan yang tinggi, padahal pada dasarnya berfungsi sebagai koridor distribusi bagi produk-produk yang dihasilkan di tempat lain. Dalam skenario seperti ini, aktivitas logistik dan ritel memang tumbuh, namun efek pengganda (*multiplier effect*) dari sektor produksi di dalam wilayah Papua tetap terbatas.



Gambar 3. Komposisi Ekspor yang Dilaporkan melalui PLBN Skouw pada Tahun 2025

Sumber: Dihitung dari nilai-nilai yang dilaporkan oleh Evarukdijati (2026)

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

3.4. Mobilitas Manusia Mendukung Permintaan Pasar

Sekitar 50.000 pergerakan lintas batas tercatat melalui PLBN Skouw sepanjang tahun 2025. Banyak warga PNG menggunakan dokumen perbatasan untuk memasuki Skouw guna berbelanja dan melakukan aktivitas lainnya. BNPP RI juga melaporkan bahwa lebih dari 1.000 penduduk PNG dapat mengunjungi Pasar Skouw selama kegiatan pasar mingguan yang ramai, untuk membeli bahan pangan pokok, produk pertanian, pakaian, serta kerajinan tangan produksi lokal (BNPP RI, 2025a).

Pola-pola ini menunjukkan bahwa mobilitas bukan sekadar variabel demografis. Mobilitas berfungsi sebagai penggerak permintaan pasar yang efektif dan membantu menjelaskan mengapa barang-barang yang berorientasi pada konsumen mendominasi komposisi ekspor formal.

3.5. Arus Mata Uang Mengonfirmasi Permintaan Konsumen

Nilai penukaran kina ke rupiah melampaui arus sebaliknya dengan selisih sekitar Rp3,9 miliar. Hal ini memberikan indikator tambahan yang independen bahwa daya beli dari PNG masuk ke dalam ekonomi perbatasan sisi Indonesia (Evarukdijati, 2025).

Tabel 4. Penukaran Mata Uang di Pasar Skouw, Semester I 2025

Arah Penukaran	Nilai
Kina PNG ditukar ke rupiah	Setara dengan Rp9,6 miliar
Rupiah ditukar ke kina PNG	Setara dengan Rp5,7 miliar
Selisih	Rp3,9 miliar

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

3.6. Pameran Perdagangan Perbatasan dan Partisipasi UMKM

Pameran Perdagangan Perbatasan Indonesia–PNG tahun 2025 menunjukkan bahwa interaksi ekonomi mulai meluas melampaui perdagangan ritel rutin. Acara ini diselenggarakan pada 9–11 Oktober 2025 dan melibatkan lebih dari 40 UMKM dari berbagai wilayah di Papua, serta mencakup kegiatan temu bisnis (*business matching*) yang mempertemukan perusahaan dari Indonesia dan PNG (BNPP RI, 2025b). Kegiatan temu bisnis ini berpotensi menggeser hubungan perbatasan dari sekadar pertukaran konsumen sederhana menjadi hubungan antarbisnis (*business-to-business*), meskipun kontribusi jangka panjangnya bergantung pada keberlanjutan transaksi—dari yang awalnya berbasis acara menjadi pesanan berulang dan hubungan pasokan formal.

3.7. Konektivitas Transportasi

Pemerintah Provinsi Papua melaporkan bahwa para pejabat dari Indonesia dan PNG sedang berupaya menetapkan pengaturan hukum dan operasional untuk transportasi penumpang lintas batas Jayapura–Vanimo, yang mencakup nota kesepahaman, prosedur operasional standar, pengaturan asuransi kendaraan, serta koordinasi kelembagaan (Pemerintah Provinsi Papua, 2025). Signifikansi ekonomi terletak pada pengurangan hambatan pergerakan di antara simpul-simpul perkotaan dan pasar utama. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mencakup koridor yang lebih luas, yang meliputi Jayapura, Muara Tami, Skouw, Wutung, dan Vanimo.

3.8. Risiko Keamanan dan Biosekuriti

Meningkatnya mobilitas juga menambah tantangan regulasi. Pada tahun 2025, otoritas PLBN melaporkan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran karantina serta upaya pemindahan barang-barang terlarang. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa perluasan perdagangan yang sah harus dibarengi dengan pengaturan bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan yang efektif. Dengan demikian, arah kebijakan yang tepat bukanlah keterbukaan tanpa batas, melainkan pengelolaan perbatasan berbasis risiko dengan tingkat fasilitasi yang tinggi; dalam pendekatan ini, perdagangan yang mematuhi aturan akan menghadapi hambatan administratif yang lebih minim, sementara pergerakan yang berisiko lebih tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dan terarah.

3.9. Pembahasan

3.9.1. Pertumbuhan Tidak Secara Otomatis Berarti Ketahanan

Temuan empiris utamanya cukup jelas: perdagangan formal melalui Skouw meningkat pesat. Namun, interpretasi analitisnya memerlukan kehati-hatian. Peningkatan dari Rp50,54 miliar menjadi Rp92,93 miliar menunjukkan arus ekonomi yang lebih kuat, tetapi hal ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa masyarakat perbatasan mengalami peningkatan yang proporsional dalam hal pendapatan, lapangan kerja, kepemilikan aset produktif, atau kapabilitas bisnis.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi perbatasan mencerminkan peningkatan arus ekonomi, sementara ketahanan ekonomi perbatasan mencerminkan kapasitas pelaku lokal untuk menangkap, mereproduksi, dan mempertahankan nilai dari arus tersebut. Perbedaan ini merupakan kontribusi analitis utama dari artikel ini.

3.9.2. Retensi Nilai Lokal sebagai Dimensi yang Kurang Terukur

Indikator administratif saat ini lebih menekankan pada nilai ekspor, jumlah pelintas batas, transaksi, dan layanan regulasi. Indikator-indikator ini memang menunjukkan skala aktivitas ekonomi di perbatasan, namun tidak secara langsung memperlihatkan seberapa besar nilai yang tetap berada di dalam ekonomi lokal. Oleh karena itu, sistem pemantauan perbatasan yang lebih berorientasi pada pembangunan perlu menyertakan indikator-indikator seperti persentase ekspor yang berasal dari Papua, jumlah UMKM milik orang Papua yang terlibat dalam ekspor formal, partisipasi pedagang asli Papua, lapangan kerja yang tercipta di wilayah perbatasan, nilai tambah yang dihasilkan secara lokal, usaha di perbatasan yang dimiliki oleh perempuan, kontrak bisnis antarperusahaan (B2B) yang berkelanjutan dengan pembeli dari PNG, serta produk pertanian lokal yang masuk ke pasar PNG. Indikator-indikator ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membedakan antara arus ekonomi dengan nilai ekonomi yang tertahan di tingkat lokal.

3.9.3. Inklusi Ekonomi Masyarakat Adat

Temuan sebelumnya mengenai perempuan asli Papua memperkuat kekhawatiran ini. Maryen dkk. (2021) menunjukkan bahwa perempuan asli Papua menghadapi kendala dalam akses permodalan dan diversifikasi komoditas. Hal ini menciptakan kemungkinan adanya paradoks, di mana pasar perbatasan tumbuh secara ekonomi, sementara partisipasi masyarakat asli tetap lemah secara struktural. Oleh karena itu, pembangunan perbatasan yang inklusif memerlukan instrumen yang terarah, seperti penyediaan modal kerja, agregasi produk, bantuan pengemasan, perizinan usaha, literasi keuangan, pembayaran digital, temu bisnis (*business matching*), dan pendampingan ekspor.

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

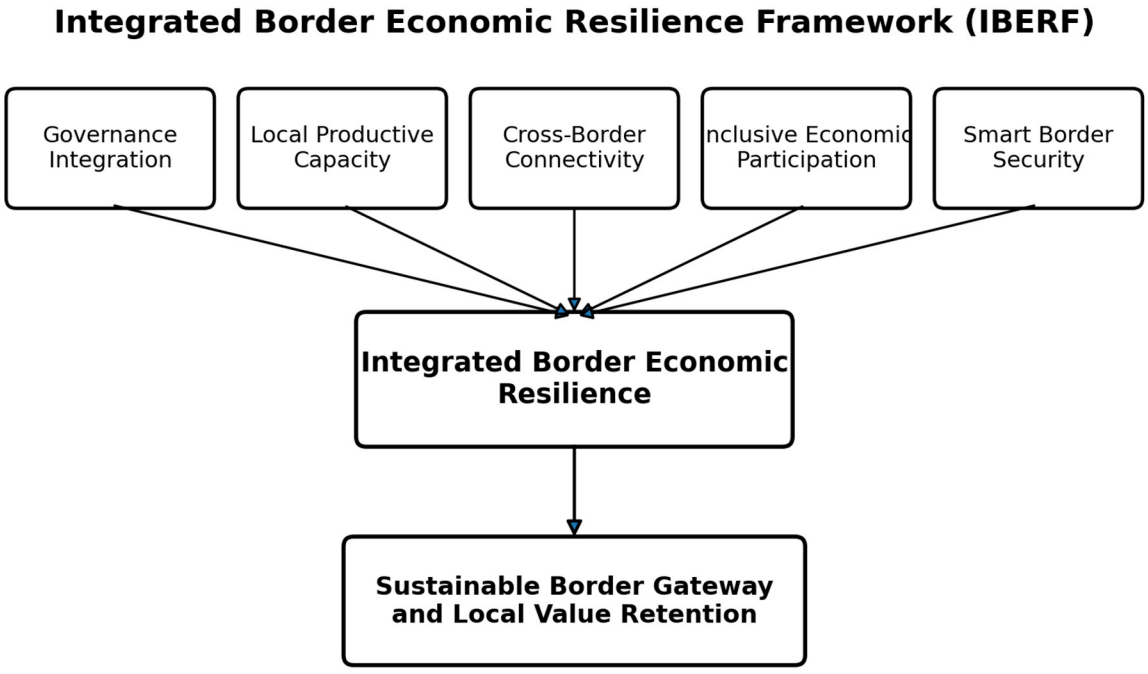
3.9.4. Dari Infrastruktur Perbatasan Menuju Ekosistem Ekonomi

Infrastruktur PLBN telah menciptakan landasan kelembagaan yang penting. Tahap pengembangan selanjutnya harus melampaui sekadar infrastruktur fisik dengan menghubungkan produksi lokal ke tahap agregasi produk dan penjaminan mutu; menghubungkan produk bersertifikat dengan logistik dan fasilitasi kepabeanan; menghubungkan prosedur perbatasan yang efisien dengan transportasi lintas batas; serta menghubungkan transportasi tersebut dengan pembeli di PNG dan pasar Pasifik yang lebih luas. Oleh karena itu, infrastruktur fisik harus dipahami sebagai kondisi pendukung (*enabling condition*), bukan sebagai syarat yang mencukupi (*sufficient condition*) bagi pembangunan ekonomi lokal.

3.9.5. Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Border Economic Resilience Framework*/IBERF)

Berdasarkan bukti yang diperoleh melalui triangulasi, studi ini mengusulkan Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (IBERF)—sebuah kerangka konseptual yang terdiri atas lima dimensi yang saling memperkuat: integrasi tata kelola, kapasitas produktif lokal, konektivitas lintas batas, partisipasi ekonomi inklusif, dan keamanan perbatasan cerdas (*smart border security*).

Integrasi tata kelola menyelaraskan BNPP RI, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, instansi transportasi, dan lembaga kemasyarakatan untuk mencapai tujuan ekonomi dan regulasi yang saling melengkapi. Kapasitas produktif lokal menghubungkan permintaan di wilayah perbatasan dengan sektor-sektor yang potensial, seperti pertanian, pengolahan pangan, kerajinan tangan, perikanan, kopi, dan kakao. Konektivitas lintas batas mengurangi biaya transaksi melalui sistem transportasi dan logistik yang dapat diprediksi di jalur Jayapura–Skouw–Vanimo. Partisipasi ekonomi inklusif menciptakan akses bagi masyarakat adat, pedagang perempuan, petani, serta UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok formal.



Gambar 4. Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (IBERF)

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Keamanan perbatasan cerdas menggunakan koordinasi berbasis risiko untuk memfasilitasi perdagangan yang patuh aturan, sekaligus menjaga keamanan hayati (biosekuriti) dan kedaulatan negara.

Kerangka kerja ini tidak menyiratkan bahwa hubungan-hubungan tersebut telah diuji secara statistik dalam studi ini. Sebaliknya, kerangka ini menyusun bukti empiris dan dokumenter ke dalam sebuah model analitis untuk memahami kondisi di mana peningkatan arus lintas batas dapat menghasilkan retensi nilai lokal yang lebih besar serta ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

3.9.6. Implikasi Kebijakan

Menetapkan Indikator Konten Lokal untuk Ekspor Perbatasan, Pelaporan kinerja PLBN harus membedakan antara barang yang diproduksi di Papua, diproses di Papua, didistribusikan melalui Papua, dan barang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Hal ini akan memperlihatkan dampak produksi regional dari perdagangan perbatasan, alih-alih hanya mengukur total nilai barang yang melintasi perbatasan.

Mengembangkan Inkubator Ekspor Papua–PNG, UMKM lokal perlu mendapatkan dukungan terintegrasi yang mencakup pemilihan produk, pengendalian mutu, pengemasan, sertifikasi, prosedur kepabeanan, logistik, hingga identifikasi pembeli.

4. Kesimpulan

Koridor Skouw–Wutung sedang mengalami transformasi yang signifikan. Ekspor resmi melalui PLBN Skouw meningkat dari sekitar Rp50,54 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp92,93 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan nominal sebesar kurang lebih 83,88%. Selanjutnya, ekspor pada bulan Januari tercatat meningkat sekitar 87,63% antara Januari 2025 dan Januari 2026.

Dengan sekitar 50.000 pergerakan lintas batas selama tahun 2025, pertukaran mata uang kina ke rupiah yang substansial, aktivitas pasar mingguan yang intensif, inisiatif temu bisnis (*business matching*), serta usulan layanan transportasi Jayapura–Vanimo, terlihat jelas bahwa Skouw kini menjalankan fungsi yang melampaui sekadar pengendalian wilayah.

Meskipun demikian, pertanyaan mendasar dalam pembangunan bukan lagi sekadar apakah perdagangan lintas batas meningkat. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa besar nilai ekonomi yang berkembang tersebut dapat diserap dan dipertahankan oleh masyarakat perbatasan serta sektor-sektor produktif milik lokal. Perbedaan sudut pandang inilah yang menjadi kebaruan dalam studi ini.

Kerangka Ketahanan Ekonomi Perbatasan Terintegrasi (IBERF) menyatakan bahwa arus perdagangan hanya akan menghasilkan pembangunan perbatasan yang berkelanjutan jika tata kelola yang efektif, kapasitas produktif, konektivitas, partisipasi masyarakat adat, dan keamanan perbatasan yang cerdas dapat berfungsi secara sinergis. Oleh karena itu, pengelolaan Skouw harus diarahkan sebagai koridor ekonomi perbatasan yang terpadu, sembari tetap mempertahankan fungsi-fungsi mendasar terkait kedaulatan, imigrasi, kepabeanan, karantina, dan keamanan.

Transisi kebijakan yang diperlukan bukanlah beralih dari aspek keamanan ke aspek ekonomi, melainkan beralih dari administrasi perbatasan yang terfragmentasi menuju tata kelola perbatasan

10.xxxx/nbgr.vXxX.xxxx

terpadu—sebuah tata kelola yang mampu mewujudkan keamanan, konektivitas, inklusi, dan nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat secara bersamaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini, serta instansi/pihak di kawasan perbatasan yang memberikan dukungan akses lapangan.

DEKLARASI

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan

Penulis menyatakan bahwa mereka hanya menggunakan teknologi AI Google Gemini untuk membantu penyuntingan tata bahasa dan keterbacaan teks. Penulis bertanggung jawab penuh atas seluruh isi, keaslian, dan substansi ilmiah manuskrip ini.

Kontribusi Penulis

Penulis 1: Konseptualisasi, metodologi, analisis data, dan penulisan draf awal; investigasi lapangan, pengumpulan data, dan penyuntingan naskah. Penulis 2: Supervisi, validasi, dan penelaahan kritis naskah final. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip ini.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan—baik secara finansial, personal, maupun profesional—yang dapat memengaruhi objektivitas atau hasil penelitian ini.

REFERENSI

Aedah, N., & Muchsin, M. (2021). Implementation of Transboundary Policy in the Republic of Indonesia-Papua New Guinea Border Area in Keerom Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8*(10), 58–64. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2999

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2025a). *Pasar Perbatasan Skouw: Simbol Persahabatan dan Penggerak Ekonomi Rakyat di Ujung Timur Indonesia*. https://bnpp.go.id/berita/pasar-perbatasan-skouw-simbol-persahabatan-dan-penggerak-ekonomi-rakyat-di-ujung-timur-indonesia

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2025b). *PLBN Skouw Jadi Pusat Interaksi Ekonomi dan Budaya lewat Ajang Border Trade Fair RI-PNG 2025*. https://bnpp.go.id/berita/plbn-skouw-jadi-pusat-interaksi-ekonomi-dan-budaya-lewat-ajang-border-trade-fair-ri-png-2025

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2026). *Statistik Ekspor Impor Provinsi Papua 2025*. https://papua.bps.go.id/en/publication/2026/07/30/587b9e8623162e6b85056aeb/statistik-ekspor-impor-provinsi-papua-2025.html

Evarukdijati. (2025, 5 Agustus). *BI Papua: Penukaran Kina ke Rupiah di Pasar Skouw Capai Rp9,6 Miliar*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/5014493/bi-papua-penukaran-kina-ke-rupiah-di-pasar-skouw-capai-rp96-miliar

Evarukdijati. (2026, 15 Januari). *Ekspor Papua melalui PLBN Skouw ke PNG Capai Rp92,9 Miliar*. ANTARA News Papua. https://papua.antaranews.com/berita/758385/ekspor-papua-melalui-plbn-skouw-ke-png-capai-rp-929-miliar

Frank, S. A. K., Idris, U., & Flassy, M. (2026). Socioeconomic Changes Post Indonesia-Papua New Guinea Cross-Border Development. *Frontiers in Sociology, 11*, 1794970. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1794970

Kalalo, J. J. J., Silambi, E. D., Maturbongs, E. E., & Marpaung, D. N. (2025). Protecting Indigenous Rights in the Indonesia–Papua New Guinea Border Area. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13*(2), 309–325. https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1536

Korwa, J. R. V. (2026a). Asymmetrical Border Governance and Everyday Borderland Practices: The Indonesia–Papua New Guinea Case. *Territory, Politics, Governance*. https://doi.org/10.1080/21622671.2026.2691049

Korwa, J. R. V. (2026b). Border Twin Cities and the Challenges of De-Securitization: Insights From Jayapura–Vanimo. *Journal of Borderlands Studies*. https://doi.org/10.1080/08865655.2026.2679251

Maryen, K. C., Womsiwor, Y., & Renyoet, C. C. (2021). Participation of Indigenous Papuan Women at the Skouw Border Market, Indonesia–PNG. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations, 1*(2), 73–84. https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i2.1794

Pakasi, U., Faridz, M., Majid, H., & Susilawati. (2024). Border Governance Through Local Community Empowerment: Insights From Indonesia–Papua New Guinea Borderline. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14*(3), 693–711. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15399

Pemerintah Provinsi Papua. (2025, 13 November). *Indonesia–Papua Nugini Sepakati Penguatan Transportasi Lintas Batas*. https://www.papua.go.id/index.php/view-detail-berita-9449/indonesiapapua-nugini-sepakati-penguatan-transportasi-lintas-batas.html

Pugu, M. R., & Renyaan, D. (2025). Implementation of Sister City Between Jayapura–Vanimo–Wewak Cities as a Model of Paradiplomacy. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 5*(2), 3360–3376. https://doi.org/10.59141/jrssem.v5i2.1058

Siborutorop, J. (2024). Cross-Border Inequality Between Indonesian Papua and Papua New Guinea: Causes and Solutions. *Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua, 5*(2), 81–90. https://doi.org/10.31957/jap.v5i2.3973

Siregar, V. H. (2026, 15 Februari). *Nilai Ekspor Awal 2026 Melonjak, BNPP RI Perkuat Peran PLBN Skouw sebagai Gerbang Perdagangan*. iNews.id. https://jayapura.inews.id/read/673197/nilai-ekspor-awal-2026-melonjak-bnpp-ri-perkuat-peran-plbn-skouw-sebagai-gerbang-perdagangan

Usman, L. (2017). The Economic Functions of Cross-Border Activities of Skouw Sae Community, Jayapura. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture, 9*(1), 150–160. https://doi.org/10.15294/komunitas.v9i1.9004